

## OPTIMALISASI TATA KELOLA BUMDES UNTUK MENDUKUNG GREENPRENEURSHIP DI DESA SUKASENANG: SEBUAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ira Geraldina<sup>1</sup>, Ake Wihadanto<sup>2</sup>, Fikri Hizryan<sup>3</sup>, Deane Rahmamita<sup>4</sup>,  
Wawan Suharmawan<sup>5</sup>, Amalia Agustina<sup>6</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup> Universitas Terbuka, Banten

[ira@ecampus.ut.ac.id](mailto:ira@ecampus.ut.ac.id)

### Abstrak

**Kata Kunci:** Tata kelola BUMDes, Greenpreneurship, Pemberdayaan masyarakat

*Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dalam menyusun struktur tata kelola BUMDes dapat menunjang greenpreneurship di BUMDes Sehati, mekanisme kemitraan yang terbangun mampu meningkatkan kapasitas kewirausahaan berbasis greenpreneurship. Kegiatan pendampingan dilakukan selama delapan bulan yang dilaksanakan secara daring dan luring. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan rancangan struktur tata kelola BUMDes dan mekanisme kemitraan untuk mendukung program greenpreneurship di Desa Sukasenang.*

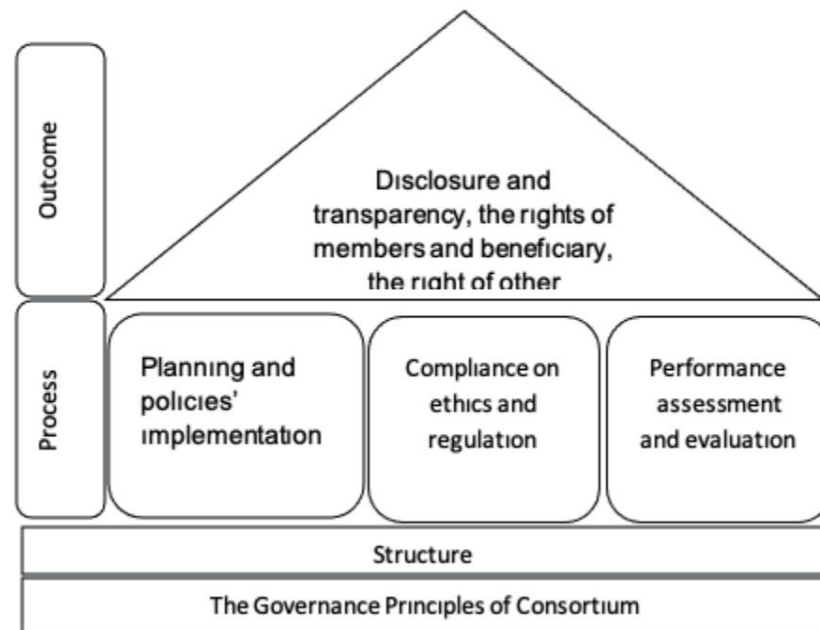
### A. Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan agenda strategis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa. Mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung agenda tersebut. BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui pengelolaan potensi desa secara optimal, baik dalam bentuk pengelolaan aset maupun pengembangan usaha produktif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (Nurhasan & Munawar, 2020). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Rahayuningsih, Budiarto, & Isminingsih, 2019).

Desa Sukasenang di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, merupakan wilayah dengan potensi sumber daya lokal yang besar. Komoditas unggulan seperti cabai besar, cabai keriting, biofarmaka (jahe, kunyit), serta berbagai jenis buah (alpukat, jambu, jeruk siam, nangka, pisang) berpeluang dikembangkan menjadi produk bernilai tambah berbasis *greenpreneurship*. Namun, BUMDes Sehati yang telah berdiri di desa ini belum mampu berfungsi secara optimal. Minimnya kapasitas manajerial pengelola, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai potensi *greenpreneurship*, serta ketiadaan inovasi produk berbasis ramah lingkungan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kemandirian

ekonomi desa. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya intervensi penguatan tata kelola dan strategi kemitraan untuk mendukung agenda *greenpreneurship* di tingkat desa.

Untuk menunjang *greenpreneurship*, BUMDes perlu mengadopsi prinsip keberlanjutan yang menjadi fondasi struktur tata kelola BUMDes. Prinsip dan struktur yang efektif dapat menopang kemitraan BUMDes. Mengingat pola kemitraan BUMDes yang beragam dan cukup kompleks, maka BUMDes perlu mempertimbangkan tarik menarik kepentingan diantara para pemangku kepentingannya. Rahmamita (2021) menekankan pentingnya tata kelola untuk menghasilkan informasi yang lebih transparan dalam pengungkapan kepada publik dapat mengurangi asimetri informasi di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, struktur dan mekanisme pengawasan dalam BUMDes sebaiknya dibangun dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan inter dan antar elemen yang terlibat (Geraldina, et al., 2024).



Gambar 1 Model Tata Kelola-Perspektif *Power Dynamic*

Sumber: Geraldina, et al., (2024)

Urgensi kegiatan ini terletak pada kebutuhan untuk merancang model tata kelola BUMDes Sehati yang tidak hanya sesuai dengan regulasi formal, tetapi juga responsif terhadap potensi *greenpreneurship*. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) bagaimana struktur tata kelola BUMDes dapat menunjang *greenpreneurship* di BUMDes Sehati, dan (2) bagaimana mekanisme kemitraan yang terbangun mampu meningkatkan kapasitas kewirausahaan berbasis *greenpreneurship*.

## B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan PKM dilaksanakan pada sekolah, masyarakat dan BUMDes Desa Sukasenang di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Pendekatan dan solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelola BUMDes mengenai potensi ekonomi dari ekonomi hijau serta meningkatkan keterampilan masyarakat dan pengelola BUMDes untuk menggerakkan ekonomi hijau di Desa Sukasenang dilaksanakan dalam 2 tahapan waktu dan kegiatan. Pada tahun 2025 kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (1) memberikan pelatihan kesadaran lingkungan kepada sekolah, masyarakat dan BUMDes; (2) Memberikan pelatihan mengenai *greenpreneurship*; (3) Memberikan pelatihan keterampilan pengelolaan bisnis dalam menunjang *greenpreneurship*. Sedangkan pada tahun 2026 kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (1) Memberikan pendampingan pengelolaan bisnis berbasis lingkungan kepada masyarakat; (2) Memberikan pendampingan pengelolaan BUMDes yang optimal. Kegiatan PKM dilaksanakan dalam kurun waktu 8 bulan, yaitu mulai dari tahap pra persiapan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap pelaporan akhir.



**Gambar 1** Inforgrafis Tahapan Kegiatan PkM

## C. Hasil dan Pembahasan

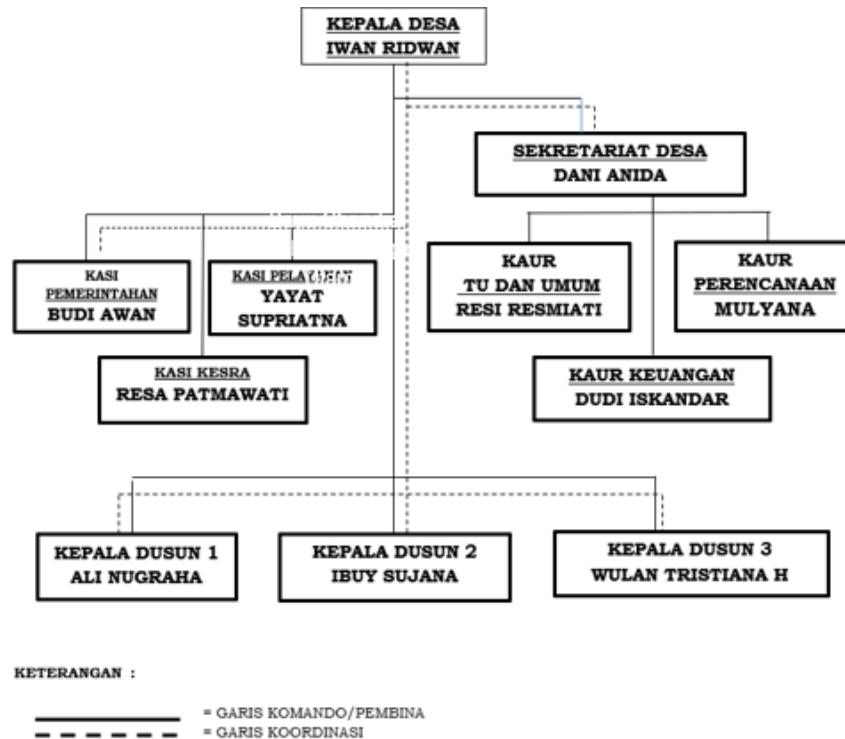
Sebagai upaya meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) dirancang dengan pendekatan hybrid, yaitu memadukan metode daring dan luring. Pendekatan ini dipilih guna menjangkau peserta secara lebih luas sekaligus memberikan

pengalaman pembelajaran langsung di lapangan. Pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan abdimas secara daring dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2025 melalui platform Zoom melalui link berikut: <https://sl.ut.ac.id/PKMSukasenang>. Materi yang diberikan meliputi 3 (tiga) pemaparan materi yaitu, materi 1 tentang “Pengembangan Keterampilan *Greenpreneurship* yang Berbasis Ekonomi Hijau”, materi 2 tentang “Pengembangan Potensi dan Usaha Lokal Berbasis Ekonomi Hijau”, dan materi 3 tentang “Pengembangan Kapasitas BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Lokal Berbasis Ekonomi Hijau”. Kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh sebanyak 30 orang masyarakat dan pengurus BUMDes Sehati di Desa Sukasenang, Garut, Jawa Barat.

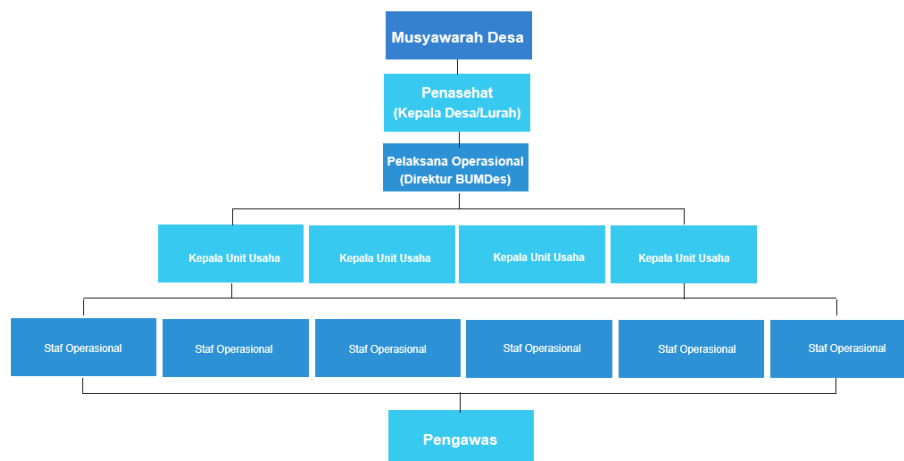
Greenpreneurship diartikan sebagai keterampilan wirausaha dalam menjalankan usaha berbasis ekonomi hijau. Dalam mewujudkan greenpreneurship, BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang dirancang untuk memberdayakan potensi lokal, mengembangkan usaha produktif, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, potensi ini hanya bisa tercapai bila disertai tata kelola yang kuat.

Kegiatan ini menekankan pentingnya BUMDes dalam menerapkan struktur tata kelola BUMDes sesuai dengan PP No 11 tahun 2021 untuk menunjang greenpreneurship di BUMDes Sehati. Saat ini, struktur organisasi BUMDes Sehati masih menyatu dengan struktur organisasi pemerintahan Desa seperti pada **Gambar 2**.



**Gambar 2** Struktur Organisasi BUMDes saat ini yang masih menjadi satu dengan Pemerintahan Desa

Tim abdimas memberikan arahan mengenai penyusunan struktur organisasi BUMDes yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti pada **Gambar 3**.



**Gambar 3** Struktur Organisasi BUMDes sesuai PP No 11 tahun 2021

Dengan adanya struktur organisasi BUMDes yang baik, pembagian tugas dan tanggung jawab dapat menjadi lebih jelas sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lebih efektif.

Kegiatan abdimas ini juga mendorong BUMDes untuk dapat menerapkan prinsip tata kelola yang Baik menurut KNKG (2021) yaitu yang beretika, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Artinya, selain BUMDes perlu membangun kepercayaan dan nilai-nilai moral secara konsisten, transparan dalam mengungkapkan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab terhadap hasil kinerjanya, BUMDes juga perlu melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan melalui kerjasama kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa upaya awal yang dapat dilakukan terkait penentuan visi, misi, dan tujuan BUMDes yang diarahkan pada etika dan keberlanjutan. Selain itu, pada abdimas ini juga dipaparkan terkait potensi konflik dengan pemangku kepentingan dan bagaimana BUMDes dapat mengantisipasi serta menghadapi jika terjadi konflik di kemudian hari akibat adanya konflik kepentingan seperti hubungan keluarga dengan pemilik usaha, dan konflik-konflik lainnya.

2. Pelaksanaan abdimas secara luring dilaksanakan pada hari Senin, 28 Juli 2025 di Gedung Serbaguna Desa Sukasenang Garut. Materi yang diberikan terkait *Business Model Canvas* untuk memetakan usaha para wirausaha di Desa Sukasenang, Garut Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 30 wirausaha yang bergerak di berbagai bidang usaha.

Dalam rangka mewujudkan BUMDes sebagai penggerak ekonomi hijau di Desa Sukasenang, BUMDes dan UMKM dapat mengembangkan bisnis berkelanjutan melalui *Business Model Canvas* (BMC) sebagai alat perencanaan bisnis. Namun, tidak hanya fokus pada potensi desa dan keterampilan wirausaha, tim abdimas juga menekankan pentingnya mekanisme kemitraan yang terbangun dari hubungan antara UMKM desa dengan BUMDes untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan berbasis *greenpreneurship*. Beberapa mekanisme yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) BUMDes sebagai pemilik usaha, artinya usaha dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh BUMDes sehingga aset dan laba milik BUMDes sepenuhnya, contohnya pengelolaan air bersih, sesuai PP Nomor 11 tahun 2021
- 2) Kemitraan strategis, di mana BUMDes dan UMKM bekerja sama, misalnya BUMDes sebagai penyedia bahan baku, UMKM sebagai bagian produksi (Zakariya, 2020).
- 3) Usaha patungan atau *joint venture*, di mana BUMDes dan UMKM mendirikan badan usaha bersama seperti koperasi, sehingga kepemilikan ditentukan berdasarkan pada penyertaan modal (da Santo, et al., (2025)

- 4) BUMDes sebagai investor pasif, di mana BUMDes memberikan modal kepada UMKM tanpa keterlibatan dalam operasional, sehingga dalam hal ini BUMDes akan menerima bagi hasil sesuai kesepakatan dengan UMKM sehingga ada pembagian keuntungan berdasarkan pada kontribusi (Maidatatia, 2024).

Dengan memahami mekanisme ini, diharapkan BUMDes dan UMKM dapat mewujudkan greenpreneurship di Desa Sukasenang dengan bentuk kemitraan yang sesuai sehingga tercipta kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan.

#### **D. Simpulan**

Sebelum pelaksanaan abdimas, BUMDes Sehati telah menjadi bagian struktur pemerintah desa Sukasenang Garut, namun belum memiliki struktur organisasi tersendiri. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan kemitraan antara BUMDes dengan pelaku usaha yang menjadi bagian BUMDes. Melalui proses pendampingan, BUMDes Sehati memiliki rancangan struktur BUMDes sebagai dasar untuk memperjelas relasi di antara para pemangku kepentingan.

Selain itu, kegiatan Abdimas telah memetakan pola-pola hubungan dengan pemangku kepentingan, sehingga memperjelas mekanisme kerjasama antara pemerintah desa, BUMDes Sehati, dan pelaku usaha. Kejelasan struktur dan mekanisme kerjasama diharapkan dapat mendorong program-program greenpreneurship di Desa Sukasenang Garut.

Keberlanjutan program greenpreneurship di Desa Sukasenang, Banyuresmi, Kabupaten Garut berpotensi memiliki tantangan jarak dan pendanaan yang terbatas. Oleh karena itu, keberlanjutan program dipastikan dengan menyusun memasukkan greenpreneurship sebagai program kerja pemerintah Desa Sukasenang.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Kegiatan abdimas ini dapat terselenggara dengan baik atas dukungan semua pihak yang terlibat, diantaranya: (1) LPPM Universitas Terbuka atas pendanaan penuh kegiatan abdimas 2025; (2) Pemerintah Desa Sukasenang-Banyuresmi Garut; (3) BUMDes Sehati Sukasenang Garut; (4) Dinas Koperasi dan UKM Garut. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin.

## F. Referensi

- Al Maidatatia, A., Destiarni, R. P., Widodo, S., & Sugiarti, T. (2024). *Mitigasi Risiko Operasional UMKM Pengelolaan Talas Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep: Pendekatan House of Risk. Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 150-167.
- da Santo, M. F. O., Juanita, G., Wohon, E. U., & Lawalu, E. M. (2025). *Integrasi Koperasi dan BUMDes sebagai Lembaga Usaha Desa dalam Perspektif Hukum terhadap Problematika dan Peluang Regulasi. Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 4(7), 4514-4525.
- Geraldina, I., Safitri, J., Pannen, P., & Julianti, E. (2024). Multistakeholders governance framework for online learning marketplace consortium: power dynamic perspective. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 26 (2), 209-227. <https://doi.org/10.17718/tojde.1470200>
- Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021*. Jakarta: KNKG
- Nurhasan, A. N., & Munawar, A. H. (2020). Efektivitas peran BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Panjalu. *Antaradhin: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 1(2), 7–12.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23*
- Rahayuningsih, Y., Budiarto, S., & Isminingsih, S. (2019). Peran BUMDes dalam penguatan ekonomi desa Sukaratu Kabupaten Serang, Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 80–87.
- Rahmamita, Deane. (2021). *Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi dan Kinerja Keuangan Konglomerasi*. Universitas Gadjah Mada.
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(3), 279-294.